PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Alamat Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Kode Pos 75611
Telp/Fax (0549) 23108 - 23112
SANGATTA - 75611

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

SELAKU

ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA BADAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR:T-493.17/1392/Kominfo-PS.4/XI/2022

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

MENIMBANG :

a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
6. Surat Keputusan Bupati Nomor 555/K.88/2017 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen Pembantu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

MENETAPAKN

PERTAMA : Daftar Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tentang Penyusunan Informasi Yang Dikecualikan

KEDUA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KETIGA : Lembar Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sangatta,
Pada tanggal : 28 November 2022
Atasan Kabupaten Kutai Timur
Sekretaris Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Rizali Hadi, S.IP
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19690117 199003 1 005

Salinan Keputusan ini di sampaikan kepada Yth :
1. Bupati Kutai Timur;
2. Wakil Bupati Kutai Timur;
3. Arsip

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
NOMOR : T-1493.17 /1392/Kominfo-PS.4/XI/2022
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecalian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	Kode Akses Elektronik Aplikasi	Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan Hak akses	Melindungi akses dari penyalahgunaan	Selama dipergunakan
2	Data dan Identitas Pengadu/Pelapor (Delik Aduan)	Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu proses penanganan aduan dan mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Dapat mengganggu proses penanganan aduan dan mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	a) Permanen b) Atas persetujuan yang bersangkutan
3	Rincian Harga Penawaran dari calon penyedia barang/ jasa (Dokumen penawaran)	Pasal 17 huruf I dan huruf j Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	Membuka rahasia perusahaan yang dijamin oleh Undang-undang	Melindungi hak atas rahasia dagang bagi penyedia barang/jasa	Selama dalam proses pengadaan barang dan jasa
4	Data Sistem Keamanan Jaringan	Pasal 17 huruf c Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Merugikan keamanan OPD maupun Pemkab	Menjaga keamanan data OPD dan Pemkab	Selama masih digunakan
5	User name dan Password Pengguna Aplikasi	Pasal 17 huruf c Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menjaga keamanan OPD maupun hal yang bersifat privasi	Permanen

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecalian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
6	Data Dokumen Desain Sistem Aplikasi	Pasal 17 huruf c Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Merugikan keamanan OPD maupun Pemkab dan berpotensi disalahgunakan	Menjaga keamanan dan menghindari kerugian OPD dan Pemkab	a) Selama masih digunakan b) Atas persetujuan Kepala OPD
7	Data dan Informasi terkait server (termasuk IP Server Aplikasi, Lokasi dan Spesifikasi Server)	Pasal 17 huruf c Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Merugikan keamanan OPD maupun Pemkab dan berpotensi disalahgunakan	Menjaga keamanan dan menghindari kerugian OPD dan Pemkab	Permanen
8	Data dan Informasi Penyelenggaraan Operasional Pengamanan Persandian	Pasal 17 huruf c Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Masyarakat mengetahui kinerja OPD dalam proses pengamanan persandian daerah yang berimplikasi negatif pada keamanan dan stabilitas daerah	Mencegah persepsi negatif masyarakat tentang kinerja pemerintah dalam pengamanan persandian daerah	Permanen
9	Database dan dokumen Kepegawaian (yang bersifat pribadi meliputi no rekening, KTP, Kartu Keluarga, dokumen mediasi perceraian dan dokumen yang bersifat rahasia pribadi individu pegawai)	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menghindari penyalahgunaan data	a) Selama masih digunakan b) Atas persetujuan Kepala OPD
10	Informasi terkait Tanda Tangan Elektronik yang bersifat individu	Pasal 17 huruf c Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menghindari penyalahgunaan data	Permanen
11	Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan yang pelaksanaannya sedang berjalan	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17	Menghambat proses kegiatan/ administrasi pembukuan	Dapat menjaga kelancaran kegiatan	Sampai telah dilaksanakannya audit
12	Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rician Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan spesifikasi dalam Pengadaan barang dan jasa	Pasal 17 huruf b Undang Undang Keterbukaan Infornformsi Perpres No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan jasa pasal 66	Muncul persaingan tidak sehat	Dapat menjaga objektifitas penilaian	Selma proses pengadaan barang dan jasa
13	Dokumen surat yang bersifat rahasia baik itu Disposisi memorandum dan nota dinas di lingkungan OPD yang menurut sifatnya harus dirahasiaka dari Pimpinan dengan kode klasifikasi sifat surat rahasia (R) dan sangat rahasia (SR)	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i	Menghambat kebijakan pimpinaan	Menjaga situasi kondusif	Hingga proses surat selesai

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecalian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
14	Internet / IP addres private, Bandwidht, Management, kode akses elektronik, sistem keamanan elektronik, sistem management database	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 31 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi dan mengamankan perangkat serta data	Permanen
15	Informasi Lokasi server	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 31 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE	dapat menimbulkan tindakan kriminal, pengrusakan, dan pencurian data	Melindungi/mengamankan perangkat data	Selamanya
16	Data Pribadi PNS dan Pegawai Kontrak (Data Rekening Pribadi)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf h) tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalah gunaan pihak lain	Melindungi data pribadi PNS dan pegawai kontrak (Non PNS) yang bersifat rahasia	apabila mendapat persetujuan dari bersangkutan
17	Berita Sandi dan berita rahasia proses persandian dan telekomunikasi, penempatan peralatan sandi dan jaringannya	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik psl 17 huru c angka 6 huruf f angka 3	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Melindungi keamanan negata	Selamanya
18	Dokumen kontrak termasuk HPS	1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17) tentang Keterbukaan Informasi Publik 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (Pasal 23) tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 3) Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 (Pasal 6 Huruf b) tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan Perubahannya	Munculnya persaingan yang tidak sehat	Melindungi informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat	selama masih proses

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecalian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
19	Identitas PNS yang mengajukan perceraian, yang masih dalam proses	a. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 (Pasal 17) tentang keterbukaan Informasi Publik b. Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Selama masih dalam proses

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecalian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
20	Dokumen Kontrak Pekerjaan, yang masih dalam proses	a. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 (Pasal 17) tentang keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (pasal 23) tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. c. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 (Pasal 6 Huruf b) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya.	Dapat memunculkan persaingan tidak sehat	Melindungi informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat	Sampai dengan proses selesai
21	Data Pendukung hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan (Kwitansi, SPP, SPM dan SP2D)	a. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 (Pasal 17) tentang keterbukaan Informasi Publik Pasal 1 angka 28, pasal 40 UU no. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998.	Membuka informasi terkait dengan identitas rekening orang/badan	Melindungi alat bukti kasus dan dokumen serta melancarkan proses penegakan hukum	Sampai dengan proses selesai
22	Rekening Bank Pribadi Pegawai PNS/Non PNS	a. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 (Pasal 17) tentang keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 1 angka 6 c. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 40 ayat 1	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan rekening bank	Sampai rekening masih digunakan
23	Dokumen Perijinan dan Non Perizinan yang bersifat pribadi	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b, h, dan j b. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014, tentang Perindustrian, Pasal 69. c. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pasal 4 huruf b dan c	Dapat mengungkap dokumen rahasia pelaku usaha	Melindungi dokumen rahasia/ data pribadi pelaku usaha	Selama dokumen masih berlaku, namun data dapat dibuka dalam hal kepetingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan pengadilan
24	Data Detail Pelaku Usaha atau Identitas Pelaku Usaha yang Mengajukan Perizinan dan Non Perizinan	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b, h, dan j b. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014, tentang Perindustrian, Pasal 69. c. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pasal 4 huruf b dan c	Data rahasia pelaku usaha dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, dan membuka data hasil survey atas biaya pribadi pemilik izin	Melindungi hak-hak pelaku usaha atas hasil kerjanya, hak atas kekayaan inteklektual serta untuk melindungi persaingan tidak sehat	Selama dokumen masih berlaku, namun data dapat dibuka dalam hal kepetingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan pengadilan

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecalian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
25	Berkas Pengajuan Perizinan dan Non Perizinan yang masih dalam proses	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b, h, dan j b. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014, tentang Perindustrian, Pasal 69. c. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pasal 4 huruf b dan c.	Dapat membocorkan hak dari pemohon izin	Melindungi hak-hak data pribadi dari pemohon	Belum mempunyai perikatan hukum yang menimbulkan keadaan hukum yang baru
26	Rencana Investasi Pelaku Usaha	a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 4 ayat (2) b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b, h, dan j. c. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pasal 4 huruf b dan c.	Dapat memunculkan persaingan usaha yang tidak sehat	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan dan menghindari persaingan usaha yang tidak sehat	Terbatas sampai proses selesai
27	Data-data dan informasi perizinan yang masih dalam proses	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b, h, dan j. b. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pasal 4 huruf b dan c.	Dapat memunculkan persaingan usaha yang tidak sehat	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Terbatas sampai proses selesai
28	Nama dan Identitas Pengadu dalam Pengelolaan Pengaduan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h.	Mengganggu kepentingan pengadu dan menurunkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan	Melindungi nama dan identitas pengadu karena bersifat pribadi serta meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan guna meningkatkan kualitas pelayanan, serta untuk menjalankan ketentuan Asas Praduga Tidak Bersalah	5 Tahun

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecalian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
29	Hak Akses OSS (Online Single Submission) Pelaku Usaha	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b, h, dan j. b. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perzinan Berusaha Berbasis Risiko. c. PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.	Dapat membocorkan hak dari pelaku usaha dan Dapat memunculkan persaingan usaha yang tidak sehat	Melindungi hak-hak data pribadi dari pelaku usaha dan Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab	Selama akun OSS masih aktif
30	Hak Akses Turunan OSS (Online Single Submission) OPD Teknis	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b, h, dan j. b. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perzinan Berusaha Berbasis Risiko. c. PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.	Dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Menghindari penyalahgunaan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Selama akun OSS masih aktif

BADAN KEPEGEWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecalian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
31	Kode etik, Disipilin dan Pemberhentian ASN	a. Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 800/k,205/2022 Tetang Pembentukan Majelis Kode Etik dan Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022. b. Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 826/K.198/2022 Tentang Pembentukan Tim Pengawasan Internal Disiplin dan Kode Etik Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022	Dapat mengungkap dokumen yang bersifat rahasia perorangan	Melindungi dokumen yang bersifat rahasia perorangan	Selama dokumen masih berlaku
32	Bantuan Hukum Bagi ASN	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi pejabat / pegawai	Dapat mengungkap rahasia pribadi pejabat / pegawai	Pegawai yang dirahasianya diungkapkan memberi persetujuan tertulis

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecalian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
33	Status dan Kedudukan Pegawai Pertimbangan Status Kepegawaian : 1. Analisis status kepegawaian 2. Penyusunan pertimbangan kedudukan kepegawaian penyelesaian pengelolaan keberatan pegawai perselisihan / sengketa pegawai	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi pejabat / pegawai	Dapat mengungkap rahasia pribadi pejabat / pegawai	Pegawai yang dirahasianya diungkapkan memberi persetujuan tertulis
34	Pengelohana data dan informasi kepegawaian ASN	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi pejabat / pegawai	Dapat mengungkap rahasia pribadi pejabat / pegawai	Pegawai yang dirahasianya diungkapkan memberi persetujuan tertulis
35	Arsip Kepegawaian fisik/Konvensional	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi pejabat / pegawai	Dapat mengungkap rahasia pribadi pejabat / pegawai	Pegawai yang dirahasianya diungkapkan memberi persetujuan tertulis
36	Administrasi Perseorangan ASN				
	1. Lamaran yang diterima 2. Nota Penetapan NIP dan Kelengkapannya 3. Nota Persetujuan / Pertimbangan Kepala BKN 4. SK Pengangkatan CASN 5. Hasil Pengujian Kesehatan 6. Sk Pengangkatan ASN 7. Sk Peninjauan Masa Kerja 8. Sk Kenaikan Pangkat 9. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/menduduki Jabatan dan surat pernyataan dan pelantikan 10. Sk Pengangkatan dalam Jabatan atau Pemberhentian dari Jabatan struktural/fungsional 11. Sk Perpindahan Wilayah Kerja 12. Sk Perpindahan Antar Instansi 13. Sk Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN) 14. Berita Acara Pemeriksaan 15. Sk Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin ASN 16. Sk Perbantuan/Dipekerjakan di luar Instansi Induk				

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecalian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	17. Sk Penarikan Kembali dari Perbantuan/Dipekerjakan 18. Sk Pemberian Uang Tunggu 19. Sk Pembebasan dari Jabatan Organik karena diangkat sebagai Pejabat Negara 20. Sk Pengalihan ASN 21. SK Pemberhentian sebagai ASN 22. SK Pemberhentian Sementara 23. Surat Keterangan Pernyataan Hilang 24. Surat Keterangan Kembalinya ASN yang dinyatakan hilang 25. Sk Penggantian Nama 26. Surat perbaikan Tanggal tahun Kelahiran 27. Akta Nikah / Cerai 28. Akta Kelahiran 29. Isian Formulir PUASN 30. Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji ASN dan Jabatan 31. Surat Pemohonan Menjadi Anggota Parpol 32. Surat Keterangan Mutasi Keluarga 33. Surat Keterangan Meninggal Dunia/Hilang 34. Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan 35. Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional 36. Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus 37. Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala 38. Surat Tugas/ Izin Belajar Dalam / Luar Negeri 39. Surat Izin Berpergian ke Luar Negeri 40. Kartu daftar Ulang (Kardaf) ASN 41. Ijazah/sertifikat 42. Sk Penempatan/Penarikan Pegawai	Pasal 17 Huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pejabat/pegawai	melindungi data diri rahasia pribadi pejabat/pegawai	Pegawai yang dirahasianya diungkapkan memberi persetujuan tertulis

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecalian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	43. SK Pengangkatan pada Jabatan di luar instansi induk 44. Surat Pertimbangan Status ASN 45. SK Pengaktifan Kembali Sebagai ASN 46. Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organik karena dicalonkan sebagai kepala/wakil kepala daerah 47. Sasaran Kinerja Pegawai 48.Sk Pensiun				

BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecalian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
37	Data Kepegawaian yang berbasis elektronik (My SAPK)	1) Undang-Undang No 14 Tahun 2008 (Pasal 17) tentang keterbukaan Informasi Publik 2) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Data Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia (data rekam medik) pegawai	- Menjaga privasi - Melindungi dari penyalahgunaan data pribadi PNS dan pegawai kontrak (Non PNS) yang bersifat rahasia	- Selama yang bersangkutan menjadi PNS - Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan
38	Identitas PNS yang mengajukan perceraian (selama proses)	1) Undang-Undang No 14 Tahun 2008 (Pasal 17) tentang keterbukaan Informasi Publik 2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia (selama Proses Perceraian)	- Selama yang bersangkutan menjadi PNS - Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan
39	Rekening Bank Pribadi Pegawai PNS/Non PNS	1) Undang-Undang No 14 Tahun 2008 (Pasal 17) tentang keterbukaan Informasi Publik 2) UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE Pasal 1 angka 6 3) Undang-undang No.10 Tahun 1998 pasal 40 ayat 1	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan rekening bank	- Sampai audit selesai - Sampai rekening masih digunakan

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecalian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
40	Lokasi server	1) Undang-Undang No 14 Tahun 2008 (Pasal 17) tentang keterbukaan Informasi Publik 2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pasal 1 angka 2	Selama digunakan	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi/mengamankan data dan perangkat
41	Kode Akses Elektronik	UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pasal 1 angka 2	Selama digunakan	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga/melindungi keamanan akses
42	Data pendukung hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan (kwitansi, SPP,SPM dan SP2D)	1) Undang-Undang No 14 Tahun 2008 (Pasal 17) tentang keterbukaan Informasi Publik 2) Pasal 1 angka 28, pasal 40 UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No 10 Tahun 1998	Membuka informasi terkait dengan identitas rekening orang/badan	Melindungi alat bukti kasus dan dokumen serta melancarkan proses penegakan hukum	Sampai dengan proses selesai
43	Hasil pemeriksaan regular oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur (LHP)	1) Undang-Undang No 14 Tahun 2008 (Pasal 17) tentang keterbukaan Informasi Publik 2) Peraturan Menpan No. Per/04.M.PAN/03/2008 tentang Kode etik Pengawasan	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data hasil pemeriksaan	Sampai dengan proses selesai
44	Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (User/password SIPD)	1) Undang-Undang No 14 Tahun 2008 (Pasal 17) tentang keterbukaan Informasi Publik 2) Pasal 30 UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data dari Sistem Informasi Pemerintah daerah (SIPD)	- Terbatas
45	Dokumen yang terkait dengan sistem keamanan informasi	1) Undang-Undang No 14 Tahun 2008 (Pasal 17) tentang keterbukaan Informasi Publik 2) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga sistem keamanan informasi termasuk infrastruktur elektroniknya	- Terbatas
46	Dokumen Proses Pengadaan Barang/Jasa (sebelum ada penetapan)	1) Undang-Undang No 14 Tahun 2008 (Pasal 17) tentang keterbukaan Informasi Publik 2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga data/dokumen penyedia	- Sampai dengan proses selesai

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecalian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	

DINAS PERKEBUNAN

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecalian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
47	Alat bukti kasus, dokumen penanganan perkara, opini hukum pendapat hukum/legal opinion, catatan mengenai proses penyelesaian sengketa, kasus hukum yang masih dalam proses	1). Pasal 17 huruf a UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2). UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 3). UU No.5 Tahun 1986 Jo UU No.9 Tahun 2004 tentang peradilan Tata Usaha Negara; 4). UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanioan Berkelanjutan	Apabila Dibuka dan Diberikan dapat menghambat penegakan hukum	Apabila Dibuka dan Diberikan dapat menghambat penegakan hukum	Sampai dengan proses selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap
48	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang dan Jasa	1). Pasal 17 huruf I UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2). Pasal 7 Perpres No. 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahdan Perubahannya Perpres No 12 Tahun 2021	Munculnya persaingan yang tidak sehat	Melindungi informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas dari persaingan usaha yang tidak sehat	Terbatas sampai selesai proses penentuan HPS
49	Dokumen Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	1). Pasal 17 huruf i dan j UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2). Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; 3). Pasal 7 Perpres no. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dan perubahannya Perpres Nomor 12 Tahun 2021	Munculnya persaingan yang tidak sehat	Melindungi informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas dari persaingan usaha yang tidak sehat	Sampai dengan Proses selesai / Dokumne kontrak telah ditanda tangani
50	Dokumen Penawaran Penyediaan Barang dan Jasa	1). Pasal 17 huruf i dan j UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2). Pasal 7 Perpres no. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dan perubahannya Perpres Nomor 12 Tahun 2021	Apabila Dibuka dan Diberikan dapat mengganggu perlindungan dan persaingan usaha tidak sehat	Melindungi informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas dari persaingan usaha yang tidak sehat	Dokumen kontrak sudah tersedia
51	Dokumen pendukung pengadaan barang/jasa, termasuk Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing), evaluasi penawaran/ kualifikasi/ hasil lelang	1). Pasal 17 huruf i dan j UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2). Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; 3). Pasal 7 Perpres no. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dan perubahannya Perpres Nomor 12 Tahun 2021	Apabila Dibuka dan Diberikan dapat mengganggu perlindungan dan persaingan usaha tidak sehat	Melindungi informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas dari persaingan usaha yang tidak sehat	Sampai dengan Proses Selesai

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecalian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
52	Proses penyelesaian pengadaan barang/jasa, termasuk penyelesaian sanggah / banding	1) Pasal 17 huruf j UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2) Pasal 7 Perpres No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Perubahannya Perpres Nomor 12 Tahun 2021	Membuka rahasia perusahaan yang dijamin oleh Undang-undang	Melindungi hak atas rahasia dagang bagi penyedia barang/jasa	Sampai dengan proses selesai
53	Data pendukung hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan (contoh : kwitansi, SPP,SPM dan SP2D)	1) Pasal 17 huruf j UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2) Pasal 1 angka 16, pasal 40 UU no 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No 10 Tahun 1998 dan UU No 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja	Membuka informasi terkait dengan identitas rekening orang/badan	Melindungi alat bukti kasus dan dokumen serta melancarkan proses penegakan hukum	Setelah dokumen informasi menjadi laporan yang audited
54	Hasil pemeriksaan regular oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur (LHP)	1) Pasal 17 huruf j UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2) Peraturan Menpan No. Per/04.M.PAN/03/2008 tentang Kode etik Pengawasan	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data hasil pemeriksaan	Setelah dokumen informasi menjadi laporan yang audited
55	Sistem management Database (Data kepegawaian, Rekening Pegawai, email pribadi, dll)	1) Pasal 17 huruf j UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2) Pasal 27 - 30 UU No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data dari penyalahgunaan dari pihak lain	2 Tahun atau Setelah dokumen informasi menjadi laporan yang audited
56	Kode Akses Elektronik	1). Pasal 17 huruf i dan j UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2) Pasal 30 UU No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data dari penyalahgunaan dari pihak lain	Sampai dengan proses selesai
57	Usulan Pelepasa Varietas Baru untuk Komoditi Perkebunan	1). Pasal 17 huruf i dan j UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2) Pasal 30 UU No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik	Dapat diperjualbelikan terhadap varietas yang akan dilepas, kemungkinan bisa dilepas pihak lain/negara lain	Melindungi informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas dari persaingan usaha yang tidak sehat	Setelah Varietas dilepas (Komoditi perkebunan)
58	Dokumen Permohonan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perkebunan	1). Pasal 17 huruf i dan j UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data dari penyalahgunaan dari pihak lain	Selama Proses pengajuan izin berlangsung dan dibuka setelah IUP Terbit

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecalian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
59	Daftar riwayat hidup pegawai, Penghasilan Pegawai, Hasil check up kesehatan pegawai/ pejabat, hasil evaluasi kapabilitas / intelektual/ kompetensi / rekomendasi pegawai, rekomendasi tim Etika, biodata elektronik PNS (database), identitas PNS yang izin perkawinan/perceraian, riwayat dan kondisi anggota keluarga pejabat/pegawai	1) Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ; 2) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pejabat/pegawai	Melindungi data diri rahasia pribadi pejabat/pegawai	Pegawai yang rahasianya diungkapkan memberikan persetujuan tertulis, dan/atau pengungkapan seseorang dalam jabatan publik

INSPEKTORAT DAERAH

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecalian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
60	Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI), yang memerlukan tindak lanjut (TL) dan yang tidak memerlukan tindak lanjut (TL)	1). Pasal 17 huruf a UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2). UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 3). UU No.5 Tahun 1986 Jo UU No.9 Tahun 2004 tentang peradilan Tata Usaha Negara; 4). UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanioan Berkelanjutan	Apabila Dibuka dan Diberikan dapat menghambat penegakan hukum	Apabila Dibuka dan Diberikan dapat menghambat penegakan hukum	Sampai dengan proses selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap
61	Laporan Hasil Audit investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut	1). Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 (pasal 17) tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2). Peraturan Pemerntah No.61 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi keamanan jalur komunikasi bersifat terbatas/khusus	Kecuali ada permintaan terbatas/khusus (penegakan hukum)

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecalian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
62	Informasi perkembangan penanganan pengaduan masyarakat	1). Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 (pasal 17) tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2). Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang perlindungan dan saksi Korban; 3). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. Per/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak	Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan	Kecuali ada permintaan terbatas/khusus (penegakan hukum)
63	Pelapor Whistleblowing System (WBS)	1). Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 (pasal 17) tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2). Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang perlindungan dan saksi Korban	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak	Menjamin kerahasiaan dan keamanan Pelapor pengaduan.	Permanen

DINAS PERHUBUNGAN

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecalian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
64	Dokumen permohonan : - Rekomendasi Ijin Trayek Operasi - Rekomendasi crossing/Ijin Perlintasan - Kartu pengawasan - Rekomendasi Ijin Usaha Perairan/Pelabuhan - Rekomendasi Ijin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi - Rekomendasi Ijin Pengoperasian Kapal Angkutan Penyebrangan - Rekomendasi Ijin Trayek Angkutan/Rekomendasi Ijin Trayek Angkutan penyebrangan Lintas kab/Kota dalam provinsi - Rekomendasi Ijin pengoperasian angkutan sungai danau penumpang kapal/speadboad antar Kab/Kota dalam provinsi ≤ 7 GT - Rekomendasi Ijin pengoperasian kapal angkutan khusus sungai dan danau - Advis terminal khusus	Pasal 17 Huruf I dan j UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik	Penyalah gunaan oleh Pihak lain	Melindungi data dari penyalhgunaan pihak lain	2 tahun atau setelah dokumen informasi menjadi laporan audited

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecalian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
65	Dokumen Pegawai ASN dan Non ASN (NIP, NIK, NPWP, Nomor Rekening Bank, BPJS/ASKES)	1) Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2). UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Dapat mengungkapkan rahasiah pribadi pejabat / pegawai	Melindungi data dari rahasiah pribadi pejabat/pegawai	Sampai dengan proses selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap
66	Daftar riwayat hidup pegawai, Kartu Pemohonan Penghasilan Pegawai (KP4), Hasil check up kesehatan pegawai/ pejabat, hasil evaluasi kapabilitas / intelektual/ kompetensi/ rekomendasi pegawai, rekomendasi tim Etika, biodata elektronik PNS (database), identitas PNS yang izin perkawinan/perceraian, riwayat dan kondisi anggota keluarga pejabat/ pegawai	1). Pasal 17 huruf a UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2). UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pejabat/pegawai	Melindungi data diri rahasia pribadi pejabat/pegawai	Pegawai yang rahasianya diungkapkan memberikan persetujuan tertulis, dan/atau pengungkapan seseorang dalam jabatan publik
67	Alat bukti kasus, dokumen penanganan perkara, opini hukum pendapat hukum/ legal opinion, catatan mengenai proses penyelesaian sengketa, kasus hukum yang masih dalam proses	1). Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2). UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 3). UU No 5 Tahun 1986 Jo UU No 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara	Apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat penegakan hukum	Melindungi dan memperlacar proses penegakan hukum	Sampai dengan proses selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap
68	Dokumen Penawaran Penyedia Barang/ Jasa	1). Pasal 17 huruf j UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2). Pasal 7 huruf b Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya	Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas dari persaingan usaha yang tidak sehat	Sampai dengan selesainya proses pengadaan
69	Dokumen evaluasi pengadaan barang/jasa, termasuk sanggah banding	1). Pasal 17 huruf j UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2). Pasal 7 huruf b Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya	Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas dari persaingan usaha yang tidak sehat	Sampai dengan selesainya proses pengadaan

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecalian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	

DINAS SOSIAL

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecalian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
70	Dokumen Perencanaan dan Anggaran (DPA)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (pasal 17) tentang keterbukaan Informasih Publik	Di buka untuk umum	-	Sampai proses selesai
71	Data Pendukung hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan (kwitansi, SPP,SPM,dan SP2D)	1) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 (pasal 17) tentang keterbukaan Informasih Publik 2). Pasal 1 angka 28, pasal 40 UU no 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan UU no 10 Tahun 1998	Di buka untuk umum	-	Sampai proses selesai
72	Identitas PNS yang Melanggar disiplin/dijatuhi, hukuman disiplin	1). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (pasal 17) tentang keterbukaan Informasih Publik 2). Peraturan pemerintah No 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Di buka untuk umum	-	Sampai proses selesai
73	Identitas PNS yang mengajukan ijin Perceraian	1). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (pasal 17) tentang keterbukaan Informasih Publik 2). Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil	Di buka untuk umum	-	Sampai proses selesai
74	Data Pribadi PNS dan Pegawai Kontrak (Non PNS)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (pasal 17) tentang keterbukaan Informasih Publik	Di buka untuk umum	-	Sampai proses selesai
75	Rekening Bank Pribadi Pegawai PNS/Non PNS	1). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (pasal 17) tentang keterbukaan Informasih Publik 2). Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang ITE Pasal 1 angka 6 3). Undang-undang No.10 Tahun 1998 pasal 40 ayat 1	-	Di tutup untuk umum untuk menjaga keamanan Pengguna rekening bank	Rekening yang di daftar masih di gunakan

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecalian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
76	Dokumen Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	1). Pasal 17 huruf I dan j UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasih publik 2). Pasal 6 huruf b Perpres No 54 tahun 2010 tentang pengadaan Barang/jasa pemerintah dan Perubahannya	Di buka untuk umum	-	Sampai proses selesai
77	Dokumen Penewaran Penyediaan Barang dan Jasa	1). Pasal 17 huruf I dan j UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasih publik 2). Pasal 6 huruf b Perpres No 54 tahun 2010 tentang pengadaan Barang/jasa pemerintah dan Perubahannya	Di buka untuk umum	-	Sampai proses selesai
78	Pengelolaan data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	1). Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 tahun 2021 tentang Pengelolaan Data terpadu Kesejahteraan Sosial 2). Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman umum Verifikasi dan Validasi data Terpadu penanganan fakir Miskin dan orang Tidak Mampu	Di buka untuk umum	-	Selama data masih di gunakan
79	Penerimaan Bantuan iuran	1). UU Nomor 40 tahun 2004: Sistem Jaminan Sosial Nasional pasal 14 ayat 2 2). Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Jaminan Kesehatan pasal 8 ayat 2 3). Permensos Nomor 21 tahun 2019 Persyaratan dan tata cara Perubahan data penerimaan bantuan Iuran jaminan kesehatan pasal 4	Di buka untuk umum	-	Selama data masih di gunakan
80	Pengelolaan Data Rehabilitasi sosial yang berkaitan dengan - Rehabilitasi Sosial anak - Rehabilitasi sosial Lanjut usia - Rehabilitasi sosial pecandu narkoba - Pelayanan sosial bagi Penyandang Disabilitas	1). Permensos No 16 tahun 2019 Tentang Standar Nasional rehabilitasi Sosial	-	Di Tuutup untuk umum untuk Melindungi data privasi soaial Masyarakat	Selama data masih di gunakan

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecalian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	

DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecalian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
81	Dokumen Perijinan	1). Undang-undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan j; 2). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, tentang Perindustrian Pasal 69	Dapat mengungkap dokumen rahasia perorangan / perusahaan	Melindungio dokumen rahasia perorangan / perusahaan	Selama dokumen masih berlaku
82	Hasil Pemeriksa reguler oleh Inspektorat (LPH)	1). Pasal 17 huruf I UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2). Peraturan Menpan No Per/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik pengawasan	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data hasil pemeriksaan	2 tahun atau setelah dokumen informasi menjadi laporan audited
83	Data Pegawai Kontrak / Non PNS	1). UU Nomor 14 / 2008 pasal 17 huruf	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Apabila mendapat persetujuan dari bersangkutan
84	Dokumen Pembinaan Internal (Penjatuhan Hukuman Disiplin)	1). UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN	Dapat mengungkapkan data pribadi seseorang	Melindungi / menjaga phisikologis pegawai yang bersangkutan	Tak Terbatas
85	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	1). Pasal 17 huruf i dan j UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2). Pasal 6 huruf b Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan Perubahannya	Munculnya Persaingan yang tidak sehat	Melindungi informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas dari persaingan usaha yang tidak sehat	Terbatas
86	Dokumen Kontrak	1). Pasal 17 huruf i dan j UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2). Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 3). Pasal 6 huruf b Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan Perubahannya	Munculnya Persaingan yang tidak sehat	Melindungi informasi yang dapat mengganggu kepentingan	Sampai dengan proses selesai

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecalian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
87	Dokumen Penawaran Barang/Jasa	1). Pasal 17 huruf i dan j UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2).Pasal 6 huruf b Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan Perubahannya	Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu perlindungan usaha tidak sehat	Melindungi informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas dari persaingan usaha yang tidak sehat	Sampai dengan proses selesai
88	Dokumen pendukung pengadaan barang / jasa, termasuk Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing), evaluasi penawaran / kualifikasi / hasil lelang	1). Pasal 17 huruf i dan j UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2). Pasal 6 huruf b Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan Perubahannya	Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu perlindungan usaha tidak sehat	Melindungi informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas dari persaingan usaha yang tidak sehat	Sampai dengan proses selesai
89	Proses penyelesaian pengadaan barang / jasa, termasuk penyelesaian sanggah / sanggah banding	1). Pasal 17 huruf i dan j UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2). Pasal 6 huruf b Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan Perubahannya	Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu perlindungan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas rahasia dagang bagi penyedia barang/jasa	Sampai dengan proses selesai
90	Data pendukung hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan (contoh: kuitansi, SPP, SPM, dan SP2D)	1). Pasal 17 huruf i dan j UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2).Pasal 1 angka 28, pasal 40 Uuno 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan UU No 10 Tahun 1998	Membuka informasi terkait dengan identitas rekening orang / badan	Melindungi alat bukti kasus dan dokumen serta melancarkan proses penegakan hukum	2 tahun atau setelah dokumen informasi menjadi laporan audited
91	Daftar riayat hidup pegawai, Kartu Pemohonan Penghasilan Pegawai (KP4), Hasil chek up kesehatan pegawai/ pejabat, hasil evaluasi kapabilitas / intelektual /kompentensi/ rekomendasi pegawai, rekomendasi tim Etika, biodata elektronik PNS (database), identitas PNS yang izin perkawinan/perceraian, riwayat dan kondisi anggota keluarga pejabat / pegawai	1). Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2). UU Nomor 5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pejabat / pegawai	Melindungi data diri rahasia pribadi pejabat / pegawai	Pegawai yang rahasianya diungkapkan memberikan persetujuan tertulis, dan / atau pengungkapan seseorang dalam jabatan publik
92	Kode Akses Elektronik	1). Pasal 17 huruf i dan j UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2).Pasal 30 UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data dari penyalahgunaan oleh pihak lain	Terbatas

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecalian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecalian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
93	Data by Name by Addres Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	1). Undang-undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan j;	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi	Sampai ada persetujuan dari orang bersangkutan/ pihak berwenang
94	Dokumen Rekomendasi dan Pertimbangan Teknis Ijin Usaha Kelautan dan Perikanan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf b dan Pasal 17 huruf b	Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha perikanan dalam menjalankan kegiatan usahanya	Melindungi pelaku usaha perikanan dari persaingan yang tidak sehat	Selama masih berlaku
95	Rencana Operaasi Pengawasan Penangkapan Ikan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Sampai pelaksanaan operasi	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur
96	Dokumen pengelolaan kepegawaian	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS
97	Laporan Keuangan (laporan keuangan yang belum diaudit)	UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUTAI TIMUR

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecalian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
98	Identitas PNS yang melanggar disipilin / dijatuhi hukuman disiplin	UU No 14/2008 pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan oleh Pihak Lain	Melindungi dari penyalahgunaan data/ Informasi yang bersangkutan	Selama yang bersangkutan menjadi PNS
99	Identitas PNS yang mengajukan ijin	UU No 14/2008 pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan oleh Pihak Lain	Melindungi data Pribadi PNS yang bersifat rahasia	Selama yang bersangkutan menjadi PNS, dan apabila yang mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
100	Data Pribadi Pegawai Kontrak/ Non PNS	UU No 14/2008 pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan oleh Pihak Lain	Melindungi data Pribadi PNS yang bersifat rahasia	Apabila mendapat persetujuan dari bersangkutan
101	Kondisi Keuangan, Aset, Pendapatan: Rekening Bank Pribadi yang	Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14/2008 tentang KIP	Penyalahgunaan oleh Pihak Lain	Menjaga keamanan rekening bank	Sampai audit selesai Selama Rekening masih digunakan
	- Laporan Keuangan belum diaudit	UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE Pasal 1 angka 6			
	- Rekening Bank Pribadi Pegawai PNS / Non PNS	UU No 10 Tahun 1998 pasal 40 ayat 1 : “Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai penyimpan dan simpanannya kecuali dalam hal sebagaimana diatur dalam pasal 41-44 dan UU No. 14/2008 pasal 17 huruf h			

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecalian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
102	Hasil hasil evaluasi sehubungan dengan kapasitas, intelektual, dan rekomendasi kemampuan seseorang meliputi : Daftar nilai DP3/ SKP Pegawai dan '- Data usulan pemindahan, pengangkatan dan pemberhentian PNS dari jabaran fungsional tertentu dan fungsional umum	Pasal 17 huruf h angka 4 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	Penyalahgunaan oleh Pihak Lain	Melindungi data Pribadi PNS yang bersifat rahasia	Selama Periode Penilaian
103	- Data usulan pemindahan, pengangkatan dan pemberhentian PNS dari jabaran fungsional tertentu dan fungsional umum	Pasal 17 huruf h angka 4 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	Penyalahgunaan oleh Pihak Lain	Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja	Sampai diterbitkannya SK
104	Data usulan Pemindahan dan Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	Pasal 17 huruf h angka 4 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	Tidak termasuk informasi yang dikecualikan	Melindungi data Pribadi PNS yang bersifat rahasia	Sampai terlaksananya pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan
105	Rincian HPS Pengadaaan Barang dan Jasa	Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 66 Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa	Penyalahgunaan oleh Pihak Lain	Efisiensi Anggaran karena mendapat penawaran harga yang wajar	Selama Proses Pengandaan Barang dan Jasa
106	Dokumen Penawaran Kontrak pengadaan Barang dan Jasa	Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 66 Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa	Penyalahgunaan oleh Pihak Lain	Dapat menjaga objektifitas Penilaian	Selama Proses Pengandaan Barang dan Jasa
107	Kode Akses (User Name dan Pasword) Aplikasi,Pasword Website dan yang berhubungan dengan teknologi informasi Bagian Sekertariat	UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE	Penyalahgunaan oleh Pihak Lain	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	Selama Kode masih digunakan
108	Aplikasi Prodeskel, Sipede, Aplikasi IDM	UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE	Penyalahgunaan oleh Pihak Lain	Menjaga Data Keamanan yang bersifat Rahasia	Selama Kode masih digunakan

DINAS PERTANIAN

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecalian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
109	Identitas PNS yang melanggar disipilin / dijatuhi hukuman disiplin	UU No 14/2008 pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan oleh Pihak Lain	Melindungi dari penyalahgunaan data/ Informasi yang bersangkutan	Selama yang bersangkutan menjadi PNS
110	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang Dan Jasa	1). Pasal 17 huruf I UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informsi Publik.	Munculnya persaingan tidak sehat	Melindungi informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas dari persaingan usaha yang tidak sehat	Sampai dengan proses selesai

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecalian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Pasal 6 huruf b Perpres No.54 Terbatas Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya.			
111	Dokumen Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	1). Pasal 17 huruf I dan j UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2) Pasal 23 UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopol.› dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; 3). Pasal 6 huruf b Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya	Munculnya persaingan tidak sehat	Melindungi informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas dari persaingan usaha yang tidak sehat	Sampai dengan proses selesai
112	Dokumen Penawaran Penyedia Barang dan Jasa	1). Pasal 17 huruf I dan j UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 2). Pasal 6 huruf b Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perübahannya	Apabila diberikan dapat mengganggu perlindungan dan persaingan usaha tidak sehat	Melindungi 'informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas dari persaingan usaha yang tidak sehat	Sampai Dengan Proses selesai
113	Dokumen pendukung pengadaan barang/ jasa,	1). Pasal 17 huruf I dan j UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 2). Pasal 6 huruf b Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perübahannya	Apabila diberikan dapat mengganggu perlindungan dan persaingan usaha tidak sehat	Melindungi 'informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas dari persaingan usaha yang tidak sehat	Sampai Dengan Proses selesai
114	Proses penyelesaian pengadaan barang/jasa, termasuk penyelesaian sanggah / sanggah banding	1). Pasal 17 huruf I dan j UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 2). Pasal 6 huruf b Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perübahannya	Membuka rahasia perusahaan yang dijamin oleh UndangUndang	Melindungi hak atas rahasia dagang bagi penyedia barang/jasa	Sampai Dengan Proses selesai
115	Data pendukung hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan (contoh : kuitansi, SPP, SPM, dan SP2D)	1). Pasal 17 huruf I dan j UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 2). Pasal 1 angka 28, pasal 40 UU no 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No 10 Tahun 1998	Membuka Informasi terkait dengan identitas rekening orang / Badan	Melindungi alat buKti kasus dan dokuen serta melancarkan proses penegakan hukum	Sampai dengan hasil Audit selesai
116	Hasil pemeriksaan reguler oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur	1). Pasal 17 huruf I dan j UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 2) Peraturan Menpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data hasil pemeriksaan	Sampai dengan hasil Audit selesai
117	Sistem Management Database, (User dan Password Database seperti : My SAPK, SRIKANDI,SIM AKU, SIPD, dll)	1). Pasal 17 huruf I dan j UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 2). Pasal 30 UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data dari penyalahgunaan oleh pihak lain	Terbatas kepada yang diberi kewenangan

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecalian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
118	Kode Password Akses Elektronik	1). Pasal 17 huruf I dan j UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 2) Pasal 30 UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data dari penyalahgunaan oleh pihak lain	Terbatas kepada yang diberi kewenangan
119	Daftar riwayat hidup pegawai, Penghasilan Pegawai, Hasil check up kesehatan pegawai/ pejabat, hasil evaluasi kapabilitas / intelektual/ kompetensi/ rekomendasi pegawai, rekomendasi tim Etika, biodata elektronik PNS (database), identitas PNS yang izin perkawinan/perceraian, riwayat dan kondisi anggota keluarga pejabat/ pegawai	1).Pasal 17 huruf b UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ; 2).UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pejabat/pegawai	Melindungi data diri rahasia pribadi pejabat/pegawai	Tidak terbatas
120	Usulan Pelepasan bibit tanaman/ Varietas Baru	1). Pasal 17 huruf b UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2). Permentan No 38 Tahun 2019 Tentang Pelepasan Varietas Tanaman ; 3). UU Hak Cipta No.28 Tahun 2014	Dapat diperjualbelikan terhadap varietas yang akan dilepas, kemungkinan bisa dilepas pihak lain/ negara lain	Melindungi informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas dari persaingan usaha yang tidak sehat	Selamanya
121	Dokumen Permohonan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Pertanian	1). Pasal 17 huruf I dan j UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data dari penyalahgunaan oleh pihak lain	2 Tahun atau setelah dokumen informasi menjadi laporan yang audited
122	Data Pribadi seperti: No. Rekening Bank, NIP,NRTK2D, NIK, KTP dan KK	1). Pasal 17 huruf b UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2).UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data dari penyalahgunaan oleh pihak lain	Tidak terbatas

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecalian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
123	Data Pribadi Pegawai ASN/Pegawai Honorer berupa: a. Nomor Induk Kependudukan b. Rekening Bank c. Rekam Medis	1. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17) Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 3. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE	Dapat mengungkap data pribadi Pegawai yang bisa bersifat rahasia	a. Menjaga privasi Pegawai b. Melindungi dari Penyalahgunaan Data Pribadi Pegawai	a. Selama yang bersangkutan masih menjadi Pegawai ASN/Pegawai Honorer b. Selama Rekening Bank Masih digunakan c. Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecalian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
124	Identitas Pelapor yang melaporkan adanya Kerusakan Lingkungan/Pencemaran Limbah	1) Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17) Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dapat mengungkap identitas pelapor yang dapat membahayakan keselamatan jiwa	a. Melindungi identitas pelapor dari penyalahgunaan pihak lain, b. Melindungi keselamatan jiwa pelapor beserta keluarganya	Tanpa batas waktuSampai dengan proses selesai
125	Identitas Pegawai negeri Sipil yang mengajukan izin perceraian	1. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17) Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi Data Pegawai Negeri Sipil yang bersifat Rahasia	a. Selama yang bersangkutan masih menjadi Pegawai ASN dan Pegawai Honorer b. Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
126	Daftar Rekomendasi dan Pertimbangan Teknis yang dikeluarkan oleh Dinas LH Kab. Kutai Timur meliputi: a. Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup b. Pertimbangan Teknis Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permukaan c. Pertimbangan Teknis Pembuangan Air Limbah ke formasi tertentu d. Pertimbangan Teknis Pemanfaatan Air Limbah ke Formasi Tertentu e. Pertimbangan Teknis Pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi ke tanah f. Pertimbangan Teknis Pembuangan air Limbah ke Laut	1) Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17) Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2.) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dapat mengungkap informasi dan dokumen mengenai Penerbitan Izin Lingkungan Hidup	Melindungi informasi dan dokumen terkait untuk melancarkan proses pemeriksaan mengenai penerbitan Izin Lingkungan Hidup	Sampai dengan Izin Lingkungan Hidup diterbitkan
127	Data Pendukung hasil pemeriksaan atas Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan (Kwitansi, SPP, SPM dan SP2D)	1) Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17) Tentang Keterbukaan Informasi Publik ; 2)Undang-Undang No. 7 tahun 1992 (Pasal 1 angka 28, Pasal 40) tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998	Membuka informasi terkait dengan identitas rekening orang/OPD	Melindungi alat bukti dan dokumen terkait untuk melancarkan proses penegakan hukum	Sampai dengan proses selesai

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecalian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
128	Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur	1) Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17) Tentang Keterbukaan Informasi Publik ; 2.)Peraturan Menpan RB No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Dapat disalahgunakan oleh pihak lain	Melindungi data Hasil Pemeriksaan	Sampai dengan proses selesai

RSUD KUDUNGGA

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecalian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
129	Biodata elektronik PNS (database)	UU no 14 Tahun 2008 Tentang KIP	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungindata pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
130	Dokumen / berkas arsip PNS	UU no 14 Tahun 2008 Tentang KIP	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungindata pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
131	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman	UU no 14 Tahun 2008 Tentang KIP	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungindata pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
132	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian	UU no 14 Tahun 2008 Tentang KIP	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungindata pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
133	Rincian HPS (Harga Perkiraan Sendiri)	UU no 14 Tahun 2008 Perpres no. 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah beserta perubahannya	Menghambat kesuksesan kebijakan karena ada pengungkapan secara premature (informasi apabila dibuka menimbulkan penilaian tidak baik)	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar	Selama proses pengadaan barang
134	Dokumen penawaran kontrak	UU no. 14 tahun 2008 Perpres no. 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah beserta perubahannya	Muncul persaingan usaha yang sehat	Dapat menjaga obyektifitas penilaian	Selama proses pengadaan barang
135	Lokal server	UU no. 11 tahun 2008 tentanfg informasi dan transaksi elektronik beserta perubahannya	Tindakan kriminal pengrusakan dan pencurian data	Melindungi / mengamanakan perangkat dan data	Tidak terbatas
136	Internet protokol / IP address private	UU no. 11 tahun 2008 tentanfg informasi dan transaksi elektronik beserta perubahannya	Penerobosan / penyalahgunaan hak akses	menjaga/melindungi hak akses	Tidak terbatas
137	Banwidht management	UU no. 11 tahun 2008 tentanfg informasi dan transaksi elektronik beserta perubahannya	Penyalahgunaan kapasitas banwidht di luar ketentuan	Penyalahgunaan kapasitas banwidht di luar ketentuan	Tidak terbatas

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecalian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
138	Kode akses elektronik	UU no. 11 tahun 2008 tentanfg informasi dan transaksi elektronik beserta perubahannya	Penyalahgunaan pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer	Tidak terbatas
139	Sistem keamanan elektronik	UU no. 11 tahun 2008 tentanfg informasi dan transaksi elektronik beserta perubahannya	Penyalahgunaan pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer	Tidak terbatas
140	Sistem managemen database	UU no 14 Tahun 2008 Tentang KIP UU no. 11 tahun 2008 tentanfg informasi dan transaksi elektronik beserta perubahannya	Penyalahgunaan pihak lain	Menjaga keamanan database	Tidak terbatas
141	Rekam medis	UU no. 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran UU no. 14 tahun 2008 tentang IKP UU no. 44 tahun 2019 tentang rumah sakit	Mengungkapkan rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang	Melindungi kerahasiaan pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang	Tidak terbatas
142	Data insiden pasien	Permenkes no. 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien	Reputasi RS dan beresiko terjadi permasalahan hukum	Melindungi reputasi RS dan meminimalisir masalah hukum	Tidak terbatas
143	Naskah kerjasama	UU no 14 Tahun 2008 Tentang KIP	Muncul persaingan usaha / kepentingan yang tidak sehat	Melindungi RS dari persaingan usaha /Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Tidak terbatas

SEKRETARIAT DEWAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecalian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
144	Alat bukti Kasus, Dokumen Penanganan Perkara, Opini Hukum, Pendapat Hukuman Legal Opinion Catatan Mengenai Proses Penyelesaian Sengketa Kasus Hukum yang masih dalam Proses	1. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 2. Undang-undang No. 18 / 1981 tentang Hukum Acara Pidana 3. Undang-Undang No. 5/1986dan undang-undang No. 9 / 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara	Apabila dibuka dan diberikan akan menghambat Proses Pengadilan	Melindungi Informasi yang dapat menghambat Proses Penegakan Hukum	Sampai dengan Proses Selesai dan Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap
145	Daftar riwayat hidup pegawai, Hasil check up kesehatan pegawai/ pejabat, hasil evaluasi kapabilitas / intelektual/ kompetensi/ rekomendasi pegawai, riwayat dan kondisi anggota keluarga pejabat/ pegawai	1. Undang-undang nomor 14 /2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-undang No. 5 / 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pegawai atau pejabat	Melindungi data diri dan rahasia pribadi Pegawai/Pejabat	Pegawai yang rahasianya diaungkapkan harus memberikan persetujuan tertulis dan atau Pengungkapan seseorang dalam Jabatan Publik

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecalian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
146	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian (selama proses)	1. Undang-undang nomor 14 /2008 Pasal 17 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PP No. 45 /1990 atas perubahan PP No. 10/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS	Penyalagunaan dan pihak lain	Melindungin data pribadi PNS yang bersifat rahasia selama proses perceraian berlangsung	Selama ang bersangkutan menjadi PNS atau mendapat yang berlangsung
147	Dokumen Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	1. Undang-Undang no 14/2008 Pasal 17 tentang keterbukaan informasi publik 2. Perpres no. 16/2008 tentang Pengadaan barang dan jasa Pemerintah dan Perubahan Perpres No. 12 / 2021	Dapat emunculkan persaingan yang tidak sehat	Melindungi informasi yang dapat mengganggu atas persaingan yang tidak sehat	Terbatas sampai Proses Penentuan HPS
148	Data Pendukung hasil pemeriksaan dan tanggung jawab Keuangan (contoh kwitansi) SPP, SPM dan SP2D	1. Undang-Undang no 14/2008 Pasal 17 tentang keterbukaan informasi publik 2. Undang-undang N0. 7/1992 tentang Pasal 2 angka 16, Pasal 40 tentangperbangkan yang diubah dengan Undang-undang N0. 11/2020 tentang Cipta Kerja	Membuka Informasi terkait dengan Identitas Rekening Orang/Badan	Melindungi alat bukti dan Dokumen serta serta mencatat proses penegakan hukum	Setelah dokumen informasi menjadi laporan yang diaudited
149	Sistem Management Database (Data Kepegawaian, Rekening Kepegawaian, Email Pribadi Dll)	1. Undang-Undang no 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik 2. Undang-undang No. 11/2008 Pasal 27 s/d 30 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi Data dan Penyalagunaan oleh Pihak lain	2 Tahun setelah meminformasi menjadi laporan yang diaudited
150	Data Pribadi ASN dan Non ASN	Undang-Undang no 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi Data Pribadi ASN dan Non ASN yang bersifat Rahasia	Selama yang bersangkutan tidak

BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecalian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
151	Risalah / Notulen Rapat Pimpian yang sifatnya tertutup	Undang-Undang no 14 Tahun 2008 (Pasal 17) tentang keterbukaan informasi publik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi Informasi yang sifatnya terbatas untuk pihak tertentu	Terbatas
152	Data ketertiban dan keamanan (pengaman, penjagaan, dan pengawalan terhadap kantor dan rumah pejabat) serta laporan ketertiban dan keamanan (kehilangan, kerusakan, kecelakaan, gangguan)	Undang-Undang no 14 Tahun 2008 (Pasal 17) tentang keterbukaan informasi publik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi Informasi yang sifatnya terbatas untuk pihak tertentu	Terbatas

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecalian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
153	Data dan informasi hasil inventarisasi serta penyimpanan yang belum diaudit	Undang-Undang no 14 Tahun 2008 (Pasal 17) tentang keterbukaan informasi publik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi Informasi yang sifatnya terbatas untuk pihak tertentu	Sampai audit selesai
154	Kode akses (username dan password) aplikasimanaemen database (SIMAKU, SIPD, SRIKANDI, RKBMD, SISPASIADA, SIRUP)	Undang-Undang no 14 Tahun 2008 (Pasal 17) tentang keterbukaan informasi publik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi Informasi yang sifatnya terbatas untuk pihak tertentu	Selama masih digunakan
155	Data pribadi ASN dan Non ASN	Undang-Undang no 14 Tahun 2008 (Pasal 17) tentang keterbukaan informasi publik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi Data Pribadi ASN dan Non ASN yang bersifat Rahasia	Selama yang bersangkutan tidak mengizinkan membuka data pribadinya

DINAS PARIWISATA

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecalian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
156	Database ASN dan Pegawai Kontrak (P3K)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17) tentang keterbukaan informasi publik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data pribadi ASN dan pegawai kontrak (P3K) yang bersifat rahasia	Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
157	Rekening Bank Pribadi ASN dan Pegawai Kontrak (P3K)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17) tentang keterbukaan informasi publik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga Keamanan Rekening Bank	Terbatas
158	Login Administrator Website/ Kode Akses Elektronik	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17) tentang keterbukaan informasi publik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga/Melindungi keamanan akses	Terbatas
159	Dokumen Proses Pengadaan Barang/Jasa sebelum ada penetapan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17) tentang keterbukaan informasi publik dan UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang larangan Monopoli dan Persaingan tidak sehat.	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga data/dokumen penyedia	Terbatas

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecalian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecalian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
160	Data Kepegawaian yang berbasis elektronik (My SAPK)	1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17) tentang Keterbukaan Informasi Publik 2) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Dapat Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia (data rekam medik) pegawai	- Menjaga privasi - Melindungi dari penyalahgunaan data pribadi PNS dan pegawai kontrak (Non PNS) yang bersifat rahasia	- Selama yang bersangkutan menjadi PNS - Apabila mendapat persetujuan
161	Identitas PNS yang mengajukan ijin perceraian (selama proses)	1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17) tentang Keterbukaan Informasi Publik 2) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia (selama Proses Perceraian)	- Selama yang bersangkutan menjadi PNS Apabila mendapat persetujuan dari bersangkutan
162	Rekening Bank Pribadi Pegawai PNS/ Non PNS	1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17) tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan rekening bank	- Sampai audit selesai
163	Pemetaan Daerah Rawan Konflik di Kabupaten Kutai Timur	1). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 th 2019 ttg perubahan atas peraturan menteri dlm negeri no 2 th 2018 Tentang Kewaspadaan Dini di Daerah 2). Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 060/2172/POLPUM Tanggal 30 Maret 2021 Tentang Pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Daerah	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data	Sampai Peta Rawan Bencana rampung

DINAS PENDIDIKAN

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecalian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
164	Data Pribadi Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf h) tentang Keterbukaan Informasi Publik 2)Permendikbud No.79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan	Dapat mengungkap rahasia data pribadi siswa, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	Menjamin kerahasiaandata pribadi siswa, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecalian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
165	Sistem Aplikasi Rencana Kerja Anggaran Sekolah (ARKAS)	1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17) tentang Keterbukaan Informasi Publik 2)Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek No.13 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data pada Sistem Aplikasi Rencana Kerja Anggaran Sekolah (ARKAS)	Terbatas
166	Sistem Management Database (User Aplikasi Kementeri+C346:F350an)	1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17) tentang Keterbukaan Informasi Publik 2)Pasal30 UUNo 11Tahun2008 tentangInformasidanTransaksi Elektronik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data dari sistem management database	Terbatas
167	Data Pendukung hasil pemeriksaan dan tanggung jawab Keuangan (contoh kwitansi) SPP, SPM dan SP2D	1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17) tentang Keterbukaan Informasi Publik 2)Pasal1angka28,pasal40 UUno7Tahun1992tentangPerbankan sebagaimanadiubahdenganUUNo10Tahun1998	Membuka Informasi terkait dengan Identitas Rekening Orang/Badan	Melindungi alat bukti kasus dan dokumen serta melancarkan proses penegakan hukum	Sampai dengan proses selesai
168	Dokumen Kontrak Pekerjaan MMAsih dalam proses	1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 3 huruf b dan c , Pasal 17 ayat huruf b, g dan i tentang Keterbukaan Informasi Publik 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (Pasal 23) tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 3) Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 (Pasal 6 Huruf b) tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan Perubahannya	Munculnya persaingan yang tidak sehat	Melindungi informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat	Sampai dengan proses selesai
169	Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang belum diaudit	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17) tentang Keterbukaan Informasi Publik	Membuka informasi terkait dengan identitas rekening orang/ badan	Melindungi alat bukti kasus dan dokumen serta melancarkan proses penegakan hukum	Sampai dengan proses selesai

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecalian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
170	Identitas PNS yang mengajukan ijin perceraian	1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17) tentang Keterbukaan Informasi Publik 2) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	- Selama yang bersangkutan menjadi PNS - Apabila mendapat persetujuan dari bersangkutan
171	Data Pribadi PNS dan Pegawai Kontrak (Non PNS)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf h) tentang Keterbukaan Informasi Publik Data terkait dengan nama jabatan	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data pribadi PNS dan pegawai kontrak (Non PNS) yang bersifat rahasia	Apabila mendapat persetujuan dari bersangkutan
172	Rekening Bank Pribadi Pegawai PNS/ Non PNS	1). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 th 2019 ttg perubahan atas peraturan menteri dlm negeri no 2 th 2018 Tentang Kewaspadaan Dini di Daerah 2). Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 060/2172/POLPUM Tanggal 30 Maret 2021 Tentang Pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Daerah	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan rekening bank	- Sampai audit selesai - Sampai rekening masih digunakan

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecalian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
173	Data Kepegawaian yang berbasis elektronik (MY SAPK)	1. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17) tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara	Dapat Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia (data rekam medik) pegawai	- Menjaga privasi - Melindungi dari penyalahgunaan data pribadi PNS dan pegawai kontrak (Non PNS) yang bersifat rahasia	- Selama yang bersangkutan menjadi PNS - Apabila mendapat persetujuan yangb bersangkutan
174	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian (selama proses)	1. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17) tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil	Penyalagunaan dan pihak lain	Melindungi data diri PNS yang bersifat rahasia (selama proses perceraian)	- Selama yang bersangkutan menjadi PNS - Apabila mendapat persetujuan yangb bersangkutan

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecalian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
175	Rekening Bank Pribadi Pegawai PNS/ Non PNS	1. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17) Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 1 angka 6 3. Undang-undang N0. 10 Tahun 998 pasal 40 ayat 1 tentang Perubahan atas undang-undang no 7 Tahun 1993 tentang Perbankan			- Sampai audit selesai - Sampai rekening masih digunakan
176	Lokasi Server	1. Undang-Undang no 14 Tahun 2008 (Pasal 17) Tentang keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 1 angka 2	Selama digunakan	Penyalahgunaan oleh Pihak lain	Melindungi/ mengamankan data dan perangkat
177	Kode Akses Elektronik	Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 1 angka 6	Selama digunakan	Penyalahgunaan oleh Pihak lain	Menjaga/melindungi keamanan akses
178	Data pendukung hasilpemeriksaan atas pen gelolaan dan tanggung jawab keuangan (Kwitansi, SPP, SPM, dan SP2D)	1. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17) Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 1 angka 28, pasal 40 Undang-undang no 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No 10 Tahun 1998	Membuka informasi terkait dengan identitas rekening orang/badan	Melindungi alat bukti kasus dan dokumen serta melancarkan proses penegakan hukum	Sampai dengan proses selesai
179	Hasil Pemeriksaan reguler oleh Indpektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur (LHP)	1. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17) Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Menpan No. Per/04.M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik Pengawasan	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data hasil pemeriksaan	Sampai dengan proses selesai
180	Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (User/Password SIPD)	1. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17) Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 30 Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data dari Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	- Terbatas
181	Dokumen yang terkait dengan sistem keamanan informasi	1. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17) Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 30 Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga sistem keamanan informasi termasuk infrastruktur elektroniknya	- Terbatas

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecalian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
182	Dokumen Proses Pengadaan Barang/Jasa (sebelum ada penetapan)	1. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17) Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Penyalahgunaan oleh pihak lain	menjaga data/dokumen penyedia	- Sampai dengan proses selesai

SEKRETARIAT DPRD

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecalian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
183	Data Pegawai yang Berbasis Elektronik	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 Tentang Keterbukaan Informsi Publik 2. UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara	Dapat mengungkap Data Pribadi PNS yang Bersifat Rahasia	Melindung dari penyalagunaan Data Pribadi PNS yang bersifat rahasia	Selama yang bersangkutan menjadi PNS apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
184	Rekening Bank Pribadi Pegawai PNS	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 Tentang Keterbukaan Informsi Publik 2. UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE pasal 1 angka 6	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga Keamanan Rekening Bank	Sampai Rekening masih digunakan
185	Identitas PNS yang mengajukan Ijin Perceraian	1. UU NO 14 tahun 2008 pasal 7 tentang keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi Data Pribadi PNS yang bersifat rahasia (selama Masih proses Perceraian)	Selama yang bersangkutan menjadi PNS apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
186	Rapat Pimpinan DPRD	Keputusan DPRD Kab. Kutai Timur No. 1 Tahun 2019 tentang Peraturan tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat	Berpotensi menyebabkan bocornya hasil rapat	Menjaga dan menjamin kerahasiaan informasi yang bersifat rahasia sehingga dapat menciptakan situasi yang kondusif	Selama Rapat Berlangsung
187	Rapat Fraksi	Keputusan DPRD Kab. Kutai Timur No. 1 Tahun 2019 tentang Peraturan tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat	Berpotensi menyebabkan bocornya hasil rapat	Menjaga dan menjamin kerahasiaan informasi yang bersifat rahasia sehingga dapat menciptakan situasi yang kondusif	Selama Rapat Berlangsung
188	Rapat Badan Anggaran	Keputusan DPRD Kab. Kutai Timur No. 1 Tahun 2019 tentang Peraturan tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat	Berpotensi menyebabkan bocornya hasil rapat	Menjaga dan menjamin kerahasiaan informasi yang bersifat rahasia sehingga dapat menciptakan situasi yang kondusif	Selama Rapat Berlangsung dan mendapat persetujuan dari Pimpinan Rapat

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecalian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
189	Rapat Konsultasi	Keputusan DPRD Kab. Kutai Timur No. 1 Tahun 2019 tentang Peraturan tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat	Rapat di laksanakan berdasarkan surat masuk dari para pihak untuk di Fasilitasi oleh Anggota DPRD	Menjaga dan menjamin kerahasiaan informasi yang bersifat rahasia sehingga dapat menciptakan situasi yang kondusif	Selama Rapat Berlangsung
190	Rapat Badan Musyawarah	Keputusan DPRD Kab. Kutai Timur No. 1 Tahun 2019 tentang Peraturan tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat	Berpotensi menyebabkan bocornya hasil rapat	Rapat Banmus merupakan Rapat untuk membahas agenda kerja Anggota DPRD	Selama Rapat Berlangsung , Sampai Hasil Jadwal Banmus Telah Di Sepakati
191	Rapat Komisi	Keputusan DPRD Kab. Kutai Timur No. 1 Tahun 2019 tentang Peraturan tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat	Berpotensi menyebabkan bocornya hasil rapat	Untuk Rapat Komisi Tergantung Agenda Rapat Berdasarkan Permintaan Para Pihak	Selama Rapat Berlangsung dan mendapat persetujuan dari Pimpinan Rapat
192	Rapat Gabungan Komisi	Keputusan DPRD Kab. Kutai Timur No. 1 Tahun 2019 tentang Peraturan tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat	Rapat Gabungan Komisi adalah Rapat lintas Bidang antara Komisi dan Para Pihak	Menjaga dan menjamin kerahasiaan informasi yang bersifat rahasia sehingga dapat menciptakan situasi yang kondusif	Selama Rapat Berlangsung dan mendapat persetujuan dari Pimpinan Rapat
193	Rapat Bapemperda	Keputusan DPRD Kab. Kutai Timur No. 1 Tahun 2019 tentang Peraturan tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat	Rapat Dalam Membahas Raperda Yang Telah Di masukkan dalam Propemperda	Menjaga dan menjamin kerahasiaan informasi yang bersifat rahasia sehingga dapat menciptakan situasi yang kondusif	Selama Rapat Berlangsung
194	Rapat Badan Kehormatan	Keputusan DPRD Kab. Kutai Timur No. 1 Tahun 2019 tentang Peraturan tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat	Berpotensi menyebabkan bocornya hasil rapat	Merupakan Rapat Tertutup Untuk Membahas Kode Etik Anggota DPRD	Selama Rapat Berlangsung dan mendapat persetujuan dari Pimpinan Rapat
195	Rapat Panitia Khusus	Keputusan DPRD Kab. Kutai Timur No. 1 Tahun 2019 tentang Peraturan tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat	Rapat Untuk Membahas Raperda dengan Instansi Terkait	Menjaga dan menjamin kerahasiaan informasi yang bersifat rahasia sehingga dapat menciptakan situasi yang kondusif	Selama Rapat Berlangsung
196	Rapat Kerja	Keputusan DPRD Kab. Kutai Timur No. 1 Tahun 2019 tentang Peraturan tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat	Berpotensi menyebabkan bocornya hasil rapat	Rapat Intern Seluruh Anggota DPRD Untuk Menindaklanjuti Hasil Rapat-Rapat	Selama Rapat Berlangsung dan mendapat persetujuan dari Pimpinan Rapat
197	Rapat Dengar Pendapat	Keputusan DPRD Kab. Kutai Timur No. 1 Tahun 2019 tentang Peraturan tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat	Rapat Untuk Mendengarkan Pendapat Atau Usulan Oleh Para Pihak	Menjaga Dan Menjamin Kerahasiaan Informasi Yang Bersifat Rahasia Sehingga Dapat Menciptakan Situasi Yang Kondusif	Selama Rapat Berlangsung

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecalian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
198	Rapat Dengar Pendapat Umum	Keputusan DPRD Kab. Kutai Timur No. 1 Tahun 2019 tentang Peraturan tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat	Rapat Untuk Mendengarkan Pendapat Atau Usulan Oleh Para Pihak	Menjaga Dan Menjamin Kerahasiaan Informasi Yang Bersifat Rahasia Sehingga Dapat Menciptakan Situasi Yang Kondusif	Selama Rapat Berlangsung
199	Laporan Keuangan Yang Belum Di Audit	Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 31 Ayat (I)	Berpotensi Menyebabkan Bocornya Data Dan Dokumen	Mengikuti Mekanisme Yang Telah Di Tentukan Oleh Tim Audit	Sampai Dengan Terbitnya Laporan Keuangan Yang Telah Di Audit
200	Rekaman CCTV	Undang-undang ITE Tahun 2018 2. UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga Dan Menjamin Kerahasiaan Informasi Yang Bersifat Rahasia Sehingga Dapat Menciptakan Situasi Yang Kondusif	Selama Tidak Ada Laporan Dari Pihak Yang Merasa Di Rugikan

KECAMATAN SANGATTA UTARA

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecalian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
201	Data ASN/ Non ASN meliputi riwayat kesehatan, kondisi aset dan rekening bank, alamat rumah, password email, user code dan kondisi keuangan	1. UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 40 ayat 2 2. UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 30 3. UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf h 4. UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN 5. UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	Mengungkap informasi/rahasia pribadi dan dapat disalahkangunakan oleh pihak yang tidak berwenang	Melindungi hak dasar pegawai/seseorang berdasarkan konstitusi	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan melalui ketentuan peraturan perundangan
202	Private IP Address, Kode Akses Elektronik, Kode User, Password dan Email	1. UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 30 2.UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf h 3. UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	Mengungkap informasi/rahasia pribadi dan dapat disalahkangunakan oleh pihak yang tidak berwenang	Menjaga keamanan jaringan komunikasi terhadap penerobosan dan penyalahgvunaan hak akses	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan melalui ketentuan peraturan perundangan

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecalian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
203	Laporan Evaluasi Kinerja Pemerintahan dan Keuangan unaudited	1. UU nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf (a) dan (j) 2. PP Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi 3. Perpres Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntanbilitas Kinerja Pemerintah 4. Permen PAN Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi dan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Dokumen dapat menimbulkan anlisa penilaian akuntabilitas kinerja yang jkeliru dan menghambat langkagh antisipatif dari pemecahan masalah	Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaa kebijakan dan program	Sampai laporan telah dinyatakan selesai diaudit
204	Laporan Hasil Peeriksaan (LHP) BPK	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf (a) 2. Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pemeriksaan Investigatif, Perhitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli Pasal 9	Menghambat proses penegakan hukum dan dapat menimbulkan analisa yang keliru sehingga terjadi pengungkapan dini/prematur	Membantu proses penyusunan kebijakan dan penyelidikan serta penyidikan	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan melalui ketentuan peraturan perundangan
205	Dokumen proses pengadaan barang dan jasa	1. UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Prakter Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 2. UU nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf (b) dan (h)	Memicu prakter monopoli dan persaingan tidak sehat	Membantu badan publik mencapai keberhasilan pelaksanaa kebijakan pengadaan barang dan jasa	Sampai proses pengadaan telah dinyatakan selesai
206	Notulen rapat yang bersifat rahasia	UU nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf (i) dan (j)	Menghambat proses penyusunan kegiatan yang disepakati dan terjadi pengungkapan dini/prematur	Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaa kebijakan	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan melalui ketentuan peraturan perundangan
207	Data pribadi pemohon pelayanan/masyarakat meliputi NIK, Nomor KK, Nomor Telepon, alamat rumah dll	1.Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 huruf g 2. UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf h 3. UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	Mengungkap informasi/rahasia pribadi dan dapat disalahkangunakan oleh pihak yang tidak berwenang	Melindungi hak dasar pegawai/seseorang berdasarkan konstitusi	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan melalui ketentuan peraturan perundangan
208	Data kasus sengketa hukum pidana,perdata, tata usaha negara dan agama serta arsipnya	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf a	Menghambat proses penegakan hukum dan proses penyelesaian sengketa	Membantu proses penyelesaian sengketa dan penyelidikan serta penyidikan	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan melalui ketentuan peraturan perundangan
209	Data pelapor pengaduan / sengketa	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf a 2. UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	Menghambat proses penegakan hukum dan proses penyelesaian sengketa	Membantu proses penyelesaian sengketa dan penyelidikan serta penyidikan	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan melalui ketentuan peraturan perundangan

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecalian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
210	Dokumen Administrasi Pertanahan dan arsipnya	1. UU nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf (h) 2. UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	Mengungkap rahasia pribadi wajib pajak tentang kondisi aset dan dapat disalahgunakan	Melindungi hak dasar masyarakat berdasarkan konstitusi	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan melalui ketentuan peraturan perundangan
211	Data masyarakat pemohon pelayanan pengajuan ijin perkawinan / perceraian dan arsipnya	1.Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 huruf g 2. UU Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan 3. UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf h 4. UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi 5. PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	Mengungkap informasi/rahasia pribadi dan dapat disalahkangunakan oleh pihak yang tidak berwenang	Melindungi hak dasar masyarakat berdasarkan konstitusi	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan melalui ketentuan peraturan perundangan
212	Dokumen Ahli Waris dan arsipnya	1. UU nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf (g) dan (h) 2. UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	Mengungkap rahasia pribadi seseorang dan dapat disalahkangunakan oleh pihak yang tidak berwenang	Melindungi hak dasar masyarakat berdasarkan konstitusi	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan melalui ketentuan peraturan perundangan
213	Dokumen Izin Mendirikan Bangunan dan arsipnya	1. UU nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf (h) 2. UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	Mengungkap rahasia pribadi wajib pajak tentang kondisi aset dan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang	Melindungi hak dasar masyarakat berdasarkan konstitusi	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan melalui ketentuan peraturan perundangan
214	Dokumen perizinan usaha dan arsipnya	1. UU nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf (h) 2. UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	Mengungkap rahasia pribadi wajib pajak tentang kondisi aset dan dapat disalahgunakan	Melindungi hak dasar masyarakat berdasarkan konstitusi	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan melalui ketentuan peraturan perundangan
215	Proposal penelitian	1. UU nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf (j) 2. UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	Merugikan proses penelitian dan terjadi pengungkapan dini/prematur	Tertutup sampai hasil penelitiannya di publikasikan	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan melalui ketentuan peraturan perundangan

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecalian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	

KECAMATAN KALIORANG

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecalian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
216	Data Pribadi PNS/Non PNS meliputi biodata, data keluarga, riwayat kesehatan, kondisi aset dan rekening bank, alamat rumah, alamat/password email, riwayat pernikahan/perceraian, hasil evaluasi kinerja, riwayat pendidikan, kondisi keuangan dll	1. UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 40 ayat 2 2. UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 30 3. UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf h 4. UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN 5. UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi 6. PP Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS 7. PP Nomor 10 Tahun 1983 Jo PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS	Mengungkap informasi/rahasia pribadi dan dapat disalahkangunakan oleh pihak yang tidak berwenang	Melindungi hak dasar pegawai/seseorang berdasarkan konstitusi	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan melalui ketentuan peraturan perundangan
217	Dokumen Kepegawaian meliputi Daftar Usulan Mutasi/Rotasi/Promosi/ Pengangkatan PNS, SKP, Nota Dinas, SK Pensiun, KARIS, KARSU, KARPEG dll	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf i 2.UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN	Mengungkap informasi/rahasia pribadi dan dapat disalahkangunakan oleh pihak yang tidak berwenang	Melindungi hak dasar pegawai/seseorang berdasarkan konstitusi	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan melalui ketentuan peraturan perundangan
218	Notulen rapat yang bersifat rahasia	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf (i) dan (j)	Menghambat proses penyusunan kegiatan yang disepakati dan terjadi pengungkapan dini/prematur	Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Sampai laporan telah dinyatakan selesai diaudit
219	Laporan Evaluasi Kinerja Pemerintahan dan Keuangan unaudited	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf (a) dan (j) 2. PP Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi 3. Perpres Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 4. Permen PAN Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi dan Akintabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Dokumen dapat menimbulkan analisa penilaian akuntabilitas kinerja yang keliru dan menghambat langkah antisipatif dari pemecahan masalah	Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan program	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan melalui ketentuan peraturan perundangan

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecalian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
220	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf (a) 2. Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli Pasal 9	Menghambat proses penegakan hukum dan dapat menimbulkan analisa yang keliru sehingga terjadi pengungkapan dini/prematur	Membantu proses penyusunan kebijakan dan penyelidikan serta penyidikan	Sampai proses pengadaan telah dinyatakan selesai
221	IP Address, Kode Akses Elektronik, Kode User, Password dan Email	1. UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 30 2. UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf h 3. UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	Mengungkap informasi/rahasia pribadi dan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang	Menjaga keamanan jaringan komunikasi terhadap penerobosan dan penyalahgunaan hak akses	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan melalui ketentuan peraturan perundangan
222	Data pribadi pemohon pelayanan/masyarakat meliputi NIK, Nomor KK, Nomor Telepon, alamat rumah dll	1.Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 huruf g 2. UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf h 3. UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	Mengungkap informasi/rahasia pribadi dan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang	Melindungi hak dasar masyarakat berdasarkan konstitusi	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan melalui ketentuan peraturan perundangan
223	Data pengajuan ijin perkawinan/perceraian dan arsipnya	1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 huruf g 2. UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 3. UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf h 4. UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi 5. PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	Mengungkap informasi/rahasia pribadi dan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang	Melindungi hak dasar masyarakat berdasarkan konstitusi	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan melalui ketentuan peraturan perundangan
224	Data kasus sengketa hukum pidana, perdata, tata usaha negara dan agama serta arsipnya	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf a	Menghambat proses penegakan hukum dan proses penyelesaian sengketa	Membantu proses penyelesaian sengketa dan penyelidikan serta penyidikan	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan melalui ketentuan peraturan perundangan
225	Dokumen Administrasi Pertanahan dan arsipnya	1.UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf h 2. UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	Mengungkap rahasia pribadi wajib pajak tentang kondisi aset dan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang	Melindungi hak dasar masyarakat berdasarkan konstitusi	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan melalui ketentuan peraturan perundangan
226	Dokumen Izin Mendirikan Bangunan dan arsipnya	1.UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf h 2. UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	Mengungkap rahasia pribadi wajib pajak tentang kondisi aset dan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang	Melindungi hak dasar masyarakat berdasarkan konstitusi	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan melalui ketentuan peraturan perundangan

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecalian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
227	Dokumen perizinan usaha dan arsipnya	1. UU nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf (g) dan (h) 2. UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	Mengungkap rahasia pribadi wajib pajak tentang kondisi aset dan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang	Melindungi hak dasar masyarakat berdasarkan konstitusi	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan melalui ketentuan peraturan perundangan
228	Dokumen Ahli Waris dan arsipnya	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf (g) dan (h) 2. UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	Mengungkap rahasia pribadi seseorang dan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang	Melindungi hak dasar masyarakat berdasarkan konstitusi	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan melalui ketentuan peraturan perundangan
229	Proposal penelitian	1. UU nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf (j) 2. UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	Merugikan proses penelitian dan terjadi pengungkapan dini/prematur	Tertutup sampai hasil penelitiannya dipublikasikan	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan melalui ketentuan peraturan perundangan
230	Surat Tanah (PPAT)	1.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 mengenai aturan yang berkaitan dengan pendaftaran peralihan hak karena berbentuk warisan 2. UU Nomor 5 Tahun 2060 Tentang Pokok Agraria	Mengungkap rahasia pribadi seseorang dan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang	Melindungi hak dasar masyarakat berdasarkan konstitusi	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan melalui ketentuan peraturan perundangan

KECAMATAN MUARA BENGKAL

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecalian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
231	Kode Akses Elektronik Data perekamamn E-KTP	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf i 2. UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, pasal 84 ayat (1) dan (2) pasal 85 ayat (1), (2) dan (3) 3. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 1 angka 6	Selama digunakan	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga dan melindungi keamanan akses
232	Kode Akses Elektronik Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 (pasal 17) Tentang KIP 2. Pasal 30 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan dari pihak lain	Melindungi keamanan data SIPD	terbatas
233	DPA dan Surat pertanggung jawaban keuangan beserta ampirannya	Pasal 17 huruf I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Psl 44 ayat 1 dan 2 UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kerasipan UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Bendahara Negara UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	Dapat menimbulkan informasi yang salah dikarenakan laporan keuangan yang belum final dan belum diaudit	Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan program	Sampai dinyatakan sebagai dokumen terbuka

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecalian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
234	Data My SAPK yang berbasis Elektronik	1. . UU Nomor 14 Tahun 2008 (pasal 17) Tentang KIP 2. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 1 angka 6 3. UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara	Dapat mengungkap data PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS dan TK2D yang bersifat rahasia	Selama yang bersangkutan memberikan persetujuan

Sekretaris Daerah
Selaku Atasan PPID Kabupaten Kutai Timur,

Rizali Hadi, S.IP
Pembina Utama Muda/IVc
NIP.19690117 199003 1 005

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Andi abd.Razaq S, SH.,MH	Kasi. Pelayanan Informasi dan Penguatan Sumber Daya Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi Provinsi Kalimantan Timur	
2	Dr.Lilik Rukitasari SH.,S.Sos.,MH	Akademisi	Dosen Trunajaya Bontang	
3	Ery Mulyadi SP.,MM	Kepala Dinas	Dinas Komunikasi Informatika Persandian Dan Statistik	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Sekretaris Daerah
Selaku Atasan PPID Kabupaten Kutai Timur,

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Rizali Hadi, S.IP
Pembina Utama Muda/IVc
NIP.19690117 199003 1 005